

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 11, November 2024

**Analisis Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun
2025-2029**

Komang Budiarsana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, Indonesia

Email: budiarsana777@gmail.com

Abstrak

Penulisan penelitian kebijakan ini untuk mendeskripsikan perumusan isu strategis perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan literatur. Terdapat sepuluh isu strategis rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 yang dihasilkan melalui pembobotan berdasarkan keterkaitan dengan isu strategis global, nasional dan Provinsi Bali, yaitu : geopolitik dan geoekonomi; alih fungsi lahan pertanian; ekonomi biru; lingkungan hidup; perkembangan teknologi; ledakan penduduk; perubahan iklim dan kebencanaan; infrastruktur pelayanan publik; tenaga kerja hijau; dan manajemen talenta. Adapun saran yang bisa dilaksanakan adalah Pemerintah Kabupaten Badung perlu melaksanakan pembahasan lebih mendalam mengenai isu strategis rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 bersama dengan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait sehingga pembangunan Kabupaten Badung memiliki tujuan dan sasaran yang tepat serta dapat menjawab permasalahan pembangunan lima tahun kedepan.

Kata Kunci: isu strategis kabupaten, isu strategis global, isu strategis nasional, isu strategis provinsi bali, rancangan teknokratik RPJMD

Abstract

The writing of this policy research is to describe the formulation of strategic issues for medium-term development planning in Badung Regency in 2025-2029. This study uses a qualitative method, namely an in-depth data processing method with data from observations, and literature. There are ten strategic issues of the 2025-2029 Badung Regency RPJMD technocratic design which are produced through weighting based on their linkage with global, national and Bali Province strategic issues, namely: geopolitics and geoeconomics; conversion of agricultural land; blue economy; Environment; technological developments; population explosion; climate change and disasters; public service infrastructure; green workforce; and talent management. The suggestion that can be implemented is that the Badung Regency Government needs to carry out a more in-depth discussion on the strategic issue of the 2025-2029 Badung Regency RPJMD technocratic design together with all regional apparatus and related stakeholders so that the development of Badung Regency has the right goals and objectives and can answer development problems in the next five years.

Keywords: *district strategic issues, global strategic issues, national strategic issues, Bali province strategic issues, RPJMD technocratic design*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Maramis et al., 2021). Rancangan teknokratik RPJMD memiliki arti yang penting karena rancangan teknokratik RPJMD dan rancangan RPJPD menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi dan program pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Ajizah et al., 2021).

Pada pasal 43 Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan teknokratik RPJMD mencakup: a) analisis gambaran umum kondisi daerah; b) perumusan gambaran keuangan daerah; c) perumusan permasalahan pembangunan daerah; d) penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan e) perumusan isu strategis daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang (Bondar, 2019).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang tergantung pada sektor pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu global yang berkembang di mancanegara. Oleh karena itu dalam menyusun rencana pembangunan perlu dilakukan penelaahan terhadap isu-isu global yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung. Selanjutnya untuk menjaga sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten dengan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan nasional maka perumusan isu strategis rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung harus memperhatikan isu strategis yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

Berdasarkan fenomena diatas maka perumusan isu strategis daerah memiliki arti yang sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Perumusan isu strategis Kabupaten Badung harus memperhatikan dan menelaah isu strategis global (internasional), nasional dan daerah provinsi Bali.

Penelitian ini menekankan pada pentingnya perumusan isu strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika global, nasional, dan regional. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi isu-isu strategis yang relevan, tetapi juga menggali keterkaitan dan dampak isu-isu tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, yang rentan terhadap perubahan kondisi global. Sebelumnya, penelitian oleh Andrias, (2024) telah membahas pentingnya rancangan teknokratik RPJMD sebagai acuan bagi calon kepala daerah dalam penyusunan visi dan misi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana isu-isu strategis global, nasional, dan provinsi dapat saling terkait dan mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah secara holistik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap isu-isu yang berkembang di daerah saat ini, memaparkan keterkaitan isu strategis daerah dengan isu strategis global dan nasional, mendeskripsikan perumusan isu strategis perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029, memberikan rekomendasi kebijakan

penyusunan isu strategis rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Adapun manfaat penelitian ini berupa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan, sehingga tersusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akuntabel, terukur dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Mahanum, 2021). Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya (Adlini et al., 2022).

Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan (Fadli, 2021).

Data yang digunakan berupa data sekunder, antara lain data rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, rancangan awal RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045, rancangan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025, RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025, artikel jurnal, dan data dari BPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Penyusunan Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Kabupaten Badung Tahun 2025-2029

Isu strategis Daerah dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Isu strategis Daerah, dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan riteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah. Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang (Senuk et al., 2021).

Isu strategis merupakan sebuah kondisi/perkembangan/peristiwa/trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Isu strategis itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam isu strategis tersebut tidak selalu bermuatan / bernuansa negatif. Isu strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki pendapatan asli daerah terbesar dengan pendapatan daerah utama bersumber dari sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu global seperti isu ekonomi, kesehatan, keamanan, lingkungan hidup, transportasi dan bencana alam. Peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dan pandemi *covid-19* pada tahun 2020 dan 2021 telah memporak porandakan perekonomian Kabupaten Badung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tahun 2020 dan 2021 berada pada level terbawah yaitu -16,55% pada tahun 2020 dan -6.74% pada tahun 2021. Demikian

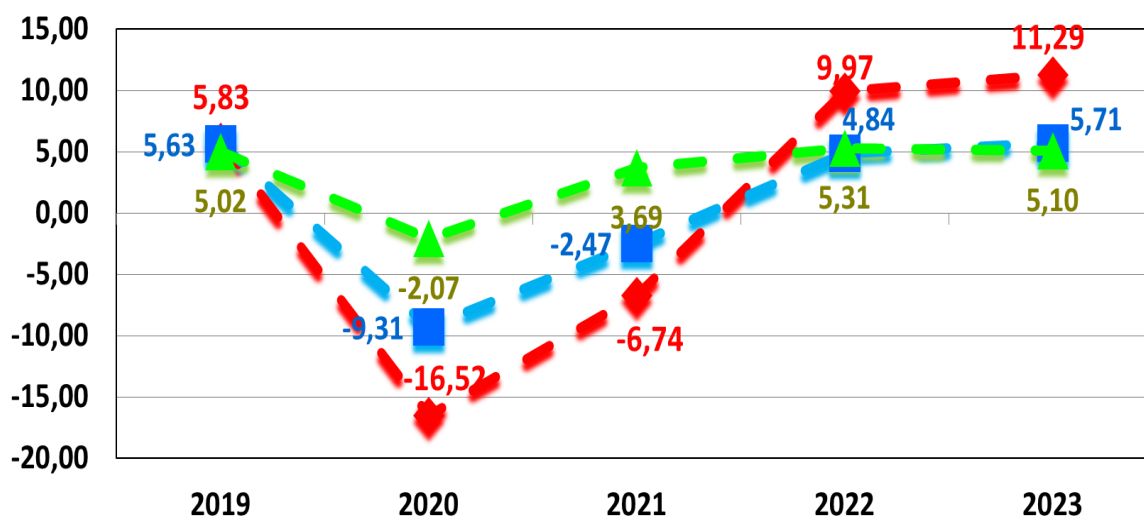
juga halnya pendapatan asli daerah pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Realisasi PAD tahun 2020 turun menjadi 2,1 Triliun dari tahun 2019 sebesar 4,8 Triliun. Selanjutnya PAD pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 1,7 Triliun. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	Realisasi Pendapatan per Tahun (dalam jutaan rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PAD	4.835.188	2.116.979	1.750.450	3.705.745	6.309.291
2	Pendapatan Transfer	568.230	567.546	866.887	893.177	907.565
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	389.548	1.221.637	90.786	5.531	728
	Jumlah Pendapatan	5.792.967	3.906.162	2.708.124	4.604.454	7.217.585

[Sumber : RKPD Kabupaten Badung Tahun 2025]

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



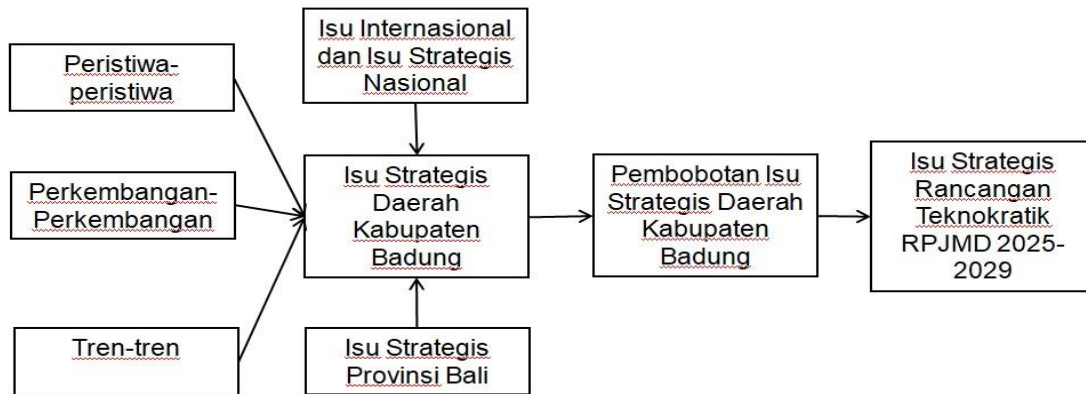
Sumber: BPS Kabupaten Badung (diolah oleh penulis), 2024

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023
Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah), 2024

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten berpedoman pada rencana pembangunan daerah provinsi dan rencana pembangunan nasional. Demikian juga halnya dalam perumusan isu strategis daerah kabupaten harus memperhatikan isu strategis daerah provinsi dan isu strategis nasional. Hal ini dipertegas kembali oleh Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang mengingatkan kembali kepada seluruh daerah bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat saat ini. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah harus memperhatikan isu-isu strategis nasional serta harus memastikan sinkronisasi antara dokumen

perencanaan daerah dan nasional baik dokumen tahunan, menengah maupun panjang (Altas, 2023).

Dari uraian diatas, dapat dibuatkan kerangka konsep pokok bahasan penelitian kebijakan seperti tertera pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Skema Kerangka Konsep Pokok Bahasan Penelitian Kebijakan
[Sumber : Data diolah, 2024]

Dalam konsep rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat lima agenda pembangunan utama yang menjadi fokus pengembangan. Pertama, agenda transformasi sosial yang mencakup isu-isu strategis seperti kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Kedua, transformasi ekonomi yang lebih kompleks, terdiri dari 14 kelompok isu strategis, termasuk pengembangan industri, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi biru, serta dukungan untuk UMKM dan koperasi. Selain itu, agenda ini juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi, ketenagakerjaan, ekonomi sirkular, tenaga kerja hijau, pengelolaan hutan lestari, digitalisasi, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, agenda transformasi tata kelola berfokus pada tujuh kelompok isu, yang meliputi integritas partai politik, sistem penggajian tunggal, kualitas regulasi, sistem anti-korupsi, dan akuntabilitas pembangunan, serta digitalisasi pelayanan publik, manajemen talenta, dan integrasi proses bisnis. Keempat, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia mengidentifikasi enam kelompok isu strategis, termasuk stabilitas makro, politik luar negeri, keamanan, pertahanan, hukum, dan demokrasi. Terakhir, agenda ketahanan sosial, budaya, dan ekologi mencakup enam kelompok isu, yang meliputi isu agama, budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, kualitas lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, energi, dan pangan. Keseluruhan agenda ini dirancang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Disamping isu strategis yang termuat dalam rancangan teknokratik RPJMN, perlu juga diperhatikan isu-isu global (Internasional) yang dapat mempengaruhi pembangunan jangka menengah perlu juga Kabupaten Badung. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan lima gejolak global yang masih membayangi Indonesia di 2024 hingga 2025. Hal itu dipicu oleh ketegangan geopolitik yang terjadi oleh perang Rusia dan Ukraina, perang dagang China dan Amerika Serikat, serta konflik antara Israel dan Palestina. Isu yang pertama yakni berasal dari menurunnya pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan hanya mampu tumbuh di kisaran 2,8 persen pada 2024 sebelum meningkat di 2025. Kedua, penurunan inflasi yang lambat, meskipun pengetatan moneter agresif diterapkan di negara maju. Harga pangan dan global masih akan meningkat, ditambah dengan adanya pengetatan pasar tenaga

kerja. Inflasi masih di atas target karena harga energi pangan global dan keketatan pasar tenaga kerja. Ketiga, tren suku bunga yang masih tinggi dalam jangka waktu yang lama atau *higer for longer*, seperti, suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau *The Fed* yang akan memberi tekanan pada pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Keempat, dolar AS masih kuat yang mengakibatkan pelemahan atau depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah. Kelima, *cash is the king*, dimana pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging ke negara maju sebagian besar ke Amerika. Disebabkan tingginya suku bunga dan kuatnya dolar. Kelima gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kita perlu waspada dan antisipasi dengan respons kebijakan yang tepat untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional (Yanuarti et al., 2020).

Selanjutnya pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman mengatakan bahwa para calon presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 haruslah memiliki pandangan kebijakan luar negeri yang "*out of the box*" selama 5 tahun mendatang terutama terhadap 10 isu internasional. Pertama, penegakan hukum internasional untuk mengatasi isu-isu kawasan seperti sengketa Laut China Selatan dan konflik Israel versus Palestina. Kedua, peran sentral Indonesia sebagai *peace broker* (juru damai) dalam bina perdamaian di kawasan ASEAN, terutama di Myanmar, Thailand dan Filipina. Ketiga, kontribusi Indonesia dalam mempromosikan dan mendukung perdamaian kawasan-kawasan konflik di dunia melalui mandat PBB dalam keikutsertaan di pasukan multinasional penjaga perdamaian. Keempat, memperkuat sentralitas dan kolektivitas ASEAN dalam *Code of Conduct* di sengketa Laut China Selatan. Kelima, memanfaatkan tiga pilar ASEAN untuk kepentingan nasional Indonesia. Keenam, implementasi *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* dalam meredam rivalitas Amerika Serikat *versus* China di kawasan. Ketujuh, memperkuat posisi dan eksistensi Indonesia dalam diplomasi di forum-forum multilateral maupun organisasi-organisasi internasional seperti Dewan Keamanan (DK) PBB agar mampu mengelola tatanan dunia sesuai kepentingan nasional Indonesia. Kedelapan, optimalisasi forum Konferensi Asia-Afrika untuk kepentingan nasional Indonesia. Kesembilan, kerja sama internasional untuk mewujudkan agenda SGDs (*Sustainable Development Goals*), dan Kesepuluh, mitigasi Indonesia baik secara politik, militer, dan ekonomi jika terjadi perang besar di masa depan (Antara, 2023).

Selanjutnya dalam rancangan awal RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 terdapat delapan isu strategis jangka panjang Provinsi Bali yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029 antara lain:

1. Demografi global
2. Geopolitik dan geoekonomi
3. Pertumbuhan kelas menengah
4. Persaingan sumber daya alam
5. Perubahan iklim
6. Tata kelola keuangan global
7. Perkembangan teknologi
8. Infrastruktur.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, terdapat permasalahan-permasalahan daerah yang telah diintegrasikan dengan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045. Dari permasalahan-permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan isu strategis perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Badung

No.	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
1.	Aspek Geografis	
a.	Alih Fungsi Lahan	Kabupaten Badung mengalami alih fungsi lahan yang signifikan pada lahan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah. Selama tahun 2018-2022, lahan pertanian Kabupaten Badung menurun sebesar 28,04%
b.	Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Badung mengalami penurunan selama periode Tahun 2018-2022. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Ini mencerminkan kualitas udara dan kualitas ekosistem lingkungan di Kabupaten Badung menurun selama periode tersebut
c.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kelurahan Tuban dan Kelurahan Tanjung Benoa merupakan wilayah di Kabupaten Badung yang diperkirakan akan mengalami defisit lahan pengembangan permukiman pada Tahun 2043 sehingga pengembangan permukiman di wilayah ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk 20 tahun mendatang Pada tahun 2043 terdapat 15 desa di Kabupaten Badung yang diperkirakan akan mengalami defisit air yaitu: Desa Abiansemal, Desa Angantaka, Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Dauh Yeh Cani, Desa Jagapati, Desa Mambal, Desa Mekar Bhuwana, Desa Selat, Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Desa Buduk, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading, Desa Tumbakbayuh.
d.	Bencana	Meskipun Indeks Risiko Bencana Badung menurun yang mengindikasikan menurunnya potensi bencana yang disertai meningkatnya kemampuan mitigasi bencana masyarakat dan pemerintah namun Badung masih harus menghadapi dampak dari perubahan iklim seperti angin kencang, gelombang panas, dan banjir
2.	Aspek Demografi	
a.	Jumlah, Sebaran, dan komposisi Penduduk	Badung Utara dan Badung Selatan mengalami ketidakseimbangan pembangunan yang ditunjukkan pada tingkat kepadatan penduduk yang tidak seimbang diantara keduanya. Badung Selatan memiliki kepadatan penduduk 2x lebih tinggi dibandingkan dengan Badung Utara yang menunjukkan perkembangan pembangunan terfokus pada Badung Selatan Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020,

	<p>Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kedua kecamatan tersebut mulai memasuki titik jenuh pada perkembangan populasi penduduk. Hal ini dimungkinkan karena semakin terbatasnya ruang-ruang pengembangan permukiman maupun semakin tingginya biaya hidup di kedua wilayah tersebut yang membuat penduduknya mengalami penurunan pertumbuhan.</p>
	<p>Angka Kemiskinan Penduduk Kabupaten Badung masih berada di atas 2%. Meskipun menjadi yang terendah di Bali namun penuntasan kemiskinan perlu tetap diprioritaskan untuk menuju kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Badung 0%.</p>
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
a. Kesejahteraan Ekonomi	<p>Perekonomian Kabupaten Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata sehingga apabila sektor ini mengalami penurunan maka akan berdampak langsung pada penurunan perekonomian Badung dan begitu pula sebaliknya. Kebergantungan Badung pada pariwisata berdampak negatif ketika Pandemi COVID-19 melanda. Pertumbuhan Ekonomi Badung anjlok ke angka -16,55% pada tahun 2020 sebagai dampak penutupan sektor pariwisata untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Kala itu pertumbuhan ekonomi Badung merupakan yang terendah di Provinsi Bali.</p> <p>Ketika Pariwisata dibuka kembali secara perlahan di Tahun 2022 dan Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Badung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2023 angka pertumbuhan ekonomi Badung melesat menjadi 11,29%.</p>
	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Badung meskipun pada tahun 2023 menurun (2,72%) namun masih berada di atas rata-rata TPT Provinsi Bali (2,69%). Oleh karenanya upaya-upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja perlu ditingkatkan lagi agar TPT Badung dapat terus menurun dan menjadi yang terendah di Provinsi Bali.</p>
	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung terus meningkat selama 5 tahun terakhir dan selalu berada di atas IPM Provinsi Bali. Namun, IPM Kabupaten Badung masih berada di bawah Kota Denpasar. Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Kabupaten Badung masih berada di</p>

	<p>bawah Kota Denpasar. Untuk itu perlu upaya lebih lanjut dalam meningkatkan IPM Kabupaten Badung agar dapat menjadi yang tertinggi di Provinsi</p> <p>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Badung mengalami penurunan pasca COVID-19 yang mengindikasikan terjadinya penurunan pemberdayaan perempuan dalam beberapa aspek pembangunan seperti keterlibatan dalam parlemen, porsi dalam struktur organisasi perusahaan/lembaga/organisasi, serta kesetaraan upah dengan laki-laki. Oleh karenanya perlu adanya upaya dalam peningkatan peran perempuan di Kabupaten Badung khususnya dalam parlemen serta keorganisasian. Disamping itu, IDG Kabupaten Badung bukan merupakan yang tertinggi di Provinsi Bali melainkan tertinggi kedua setelah Kabupaten Tabanan.</p>
4. Aspek Daya Saing Daerah	
a. Daya Saing SDM	<p>Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD (usia 7-12 tahun) dan SMP (usia 13-15 tahun) Kabupaten Badung merupakan yang tertinggi di Provinsi Bali. Meskipun capaiannya tertinggi di Provinsi Bali namun APS SD (99,99%) dan SMP (99,49%) Kabupaten Badung tidak menyentuh angka 100%. Oleh karenanya program peningkatan pemerataan pendidikan di kabupaten Badung perlu mendapatkan perhatian untuk menjamin seluruh penduduk Badung mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dan setara.</p> <p>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Badung belum mencapai kondisi ideal. RLS ideal adalah 12 tahun yang artinya anak-anak usia 6 tahun memiliki lama bersekolah ideal selama 12 tahun yang mampu mengantarnya hingga tamat SMA. RLS Kabupaten Badung sendiri pada tahun 2023 adalah 10,90 Tahun atau rata-rata penduduk Kabupaten Badung telah menempuh sekolah hingga pada jenjang kelas XI SMA. Untuk itu perlu upaya meningkatkan RLS Kabupaten Badung untuk mencapai kondisi ideal yaitu 12 Tahun. Pada sisi lainnya, RLS Kabupaten Badung masih berada di bawah Kota Denpasar</p> <p>Siswa SD di Kabupaten Badung memiliki tingkat literasi dan numerasi yang berada dalam klasifikasi sedang dimana perlu ditingkatkan sehingga masuk ke dalam klasifikasi tinggi. Siswa SMP di Kabupaten Badung memiliki tingkat literasi tinggi namun tingkat numerasi masih sedang sehingga khusus dibutuhkan peningkatan kemampuan numerasi untuk mencapai klasifikasi tinggi.</p>

b. Daya saing infrastruktur wilayah	Adanya penurunan kualitas infrastruktur jalan dan terdapat permasalahan dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur jalan di Kabupaten Badung.
	Terjadi penurunan signifikan dalam hal persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitas layak pada tahun 2023 yakni dari 100% menjadi 84,41%. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pemeliharaan, perluasan dan aksesibilitas terhadap infrastruktur sanitasi di Kabupaten Badung pada periode tersebut.
	Rasio jaringan irigasi Kabupaten Badung mengalami peningkatan, namun masih terdapat lahan pertanian di Kabupaten Badung yang tidak terlayani oleh jaringan irigasi secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam distribusi infrastruktur jaringan irigasi yang berdampak pada produksi pertanian.
	Meskipun pada tahun 2021 sudah mencapai 100%, namun terjadi penurunan persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi ini menimbulkan kekhawatiran akan konsistensi akses terhadap air minum yang layak bagi rumah tangga di Kabupaten Badung. Selain itu, persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih dari perpipaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama terlihat dari data pada tahun 2018 dan 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah rumah tangga meningkat, namun pelayanan air bersih perpipaan tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
5 Aspek Pelayanan Umum	
a. Pelayanan Publik	Nilai pelayanan publik di Kabupaten Badung mengalami penurunan yang awalnya berada di angka 97,53 di tahun 2022 berubah menjadi 97,22 di tahun 2023. Apabila kita bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, Kabupaten Badung merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami penurunan nilai indeks pelayanan publik.
b. Inovasi Daerah	Kabupaten Badung mendapatkan nilai indeks Inovasi Daerah sebesar 55,16 yang menempatkan Kabupaten Badung memiliki nilai indeks tertinggi kedua di Provinsi Bali dengan status daerah inovatif tepat berada dibawah Kota Denpasar.
c. Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Badung memiliki predikat "Cukup" untuk Indeks SPBE yang berada di bawah Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.

[Sumber : Rancangan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045]

Berdasarkan Tabel 3. di atas, terlihat bahwa Kabupaten Badung menghadapi sejumlah

tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi meliputi inklusi sosial ekonomi bagi penyandang disabilitas, akses terhadap pangan yang cukup, pola konsumsi yang tidak merata, kesehatan ibu dan anak, lapangan kerja, infrastruktur, pengelolaan sampah, energi, dan pelestarian lingkungan. Perlindungan terhadap nelayan skala kecil juga menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi masalah ini dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan tersebut dirumuskan isu strategis yang merupakan hasil analisis pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diproyeksikan sehingga menghasilkan isu-isu utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tertuang pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Isu Stretegis Pembangunan Kabupaten Badung

No.	Kelompok Isu	Isu Strategis Permasalahan Pembangunan
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IPM Kabupaten Badung bukan yang terbaik di Bali ✓ Tingkat Pengangguran Terbuka di atas rata-rata ✓ Provinsi Bali ✓ Angka Partisipasi Sekolah belum tuntas 100% ✓ Rata-rata lama sekolah belum mencapai batas ideal ✓ Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP yang masih berada pada klasifikasi sedang ✓ Angka Kebergantungan Penduduk masih tinggi ✓ Penuntasan Prevalensi Stunting
2.	Ketahanan dan Diversifikasi Ekonomi Badung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perekonomian Kabupaten Badung masih sangat bergantung pada sektor pariwisata yang membutuhkan adanya upaya diversifikasi ekonomi yaitu pertanian, ekonomi kreatif, maupun IKM. ✓ Pemerataan persebaran penduduk untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan ruang dan lingkungan ✓ Angka Kemiskinan yang belum mencapai 0% ✓ Alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan dan pelestarian alam sekaligus budaya Badung ✓ Angka pengangguran Badung masih di atas rata-rata Provinsi Bali ✓ Pembangunan dan pemberdayaan Gender
3.	Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelayanan publik Kabupaten Badung yang ✓ menurun ✓ Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam ✓ Sistem Pemerintahan yang belum optimal ✓ Belum optimalnya Reformasi Birokrasi

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan pemanfaatan biaya pembangunan dari pihak ketiga ✓ Kualitas ASN yang perlu ditingkatkan kembali
4. Penegakan Hukum dan Keamanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Sistem Pemerintahan yang belum optimal khususnya pada sosialisasi dan implementasi peraturan daerah ✓ Keamanan dan ketertiban daerah khususnya non militer (siber, ujaran kebencian, berita hoax, kejahatan melalui media online, serta narkoba dan obat-obatan terlarang) dan praktek usaha problematis (tanpa ijin, mengganggu kawasan sekitar, penunggakan pajak daerah dll)
5. Pelestarian Seni, Adat, dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Heterogenitas penduduk yang semakin meningkat yang berpengaruh pada luntarnya jati diri masyarakat Badung. ✓ Peran serta masyarakat dan desa adat dalam pembangunan yang belum optimal ✓ Pelestarian subak untuk meredam alih fungsi lahan pertanian ✓ Belum optimalnya pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya
6. Kelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana, dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebaran Jumlah Penduduk yang tidak merata antara Badung Utara dan Badung Selatan ✓ Penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya kualitas tutupan lahan dan kualitas air ✓ Sebagian wilayah di Abiansemal, Kuta Utara, dan Mengwi diperkirakan akan mengalami defisit air pada akhir tahun 2045
7. Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Sarana dan Prasarana Publik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aksesibilitas kawasan menurun akibat kualitas ✓ jaringan jalan yang belum optimal serta kemacetan lalu lintas ✓ Cakupan pelayanan air minum yang belum tuntas 100% ✓ Pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal mencakup seluruh lahan pertanian ✓ Akses pelayanan jaringan sanitasi yang belum optimal ✓ Pelayanan persampahan yang perlu ditingkatkan

[Sumber : Rancangan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045]

Berdasarkan tabel 3. di atas terlihat bahwa isu strategis yang dimunculkan masih bersifat sektoral dan cenderung mengarah kepada tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga belum

mencerminkan tantangan pembangunan daerah dua puluh tahun kedepan.

Pembahasan Penyusunan Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Kabupaten Badung Tahun 2025-2029

Berdasarkan kerangka pikir pembahasan maka penentuan isu strategis daerah harus memperhatikan peristiwa-peristiwa, perkembangan-perkembangan dan tren-tren yang berkembang serta isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Bali. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa, perkembangan, tren dan pentahapan jangka panjang pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, maka Tahap I pada tahun 2025-2029 merupakan tahap akselerasi pondasi transformasi yang lebih menitikberatkan pada optimalisasi pelayanan dasar prima bagi penduduk yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, penguatan diversifikasi komoditas unggulan, pengembangan agro industri unggulan, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, pemerataan akses digital, dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, dan pengintegrasian perangkat daerah dan pelayanan publik, penguatan tata kelola supremasi hukum yang mendukung kondusivitas pembangunan dan investasi guna mendorong peningkatan daya saing, penguatan adat, agama, dan budaya, pembentukan masyarakat berdaya saing dan tangguh bencana dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, peningkatan pembangunan dan konektivitas wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan serta pemenuhan infrastruktur layanan dasar khususnya pada bidang pertanian organik dan pariwisata berkelanjutan, penguatan dan pemerataan sarana, prasarana, dan utilitas pelayanan dasar serta lingkungan yang berkualitas, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional, perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen resiko; peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*. Berdasarkan uraian diatas, maka isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ledakan penduduk

Ledakan penduduk adalah kondisi di mana angka pertumbuhan penduduk meningkat pesat dalam waktu singkat, sering kali terjadi di negara berkembang dengan angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah (Bidarti, 2020). Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, perlu mengontrol laju pertumbuhan penduduk untuk mencegah ledakan penduduk. Dalam 40 tahun, jumlah penduduk Indonesia meningkat lebih dari 100%, dari sekitar 98 juta jiwa pada tahun 1960 menjadi 204 juta jiwa pada tahun 2000. Jika tidak diatasi, ledakan penduduk dapat menyebabkan dampak negatif seperti peningkatan kemiskinan, kekurangan pangan, munculnya pemukiman kumuh, dan kesulitan pemerintah dalam menyediakan sarana kebutuhan masyarakat.

Di Kabupaten Badung, jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020 adalah 548.191 jiwa, dengan Kecamatan Mengwi dan Kuta Selatan sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dan terendah di Kecamatan Petang. Pada tahun 2022, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 549.527 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 100,3. Kepadatan penduduk Kabupaten Badung secara umum adalah 1.310 jiwa/km², dengan Kecamatan Kuta memiliki kepadatan tertinggi, yaitu 3.377 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang antara Badung Selatan dan Badung Utara menunjukkan konsentrasi pembangunan yang lebih tinggi di selatan. Selama periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung mencapai 4,62%, dengan rata-rata 2,2% per tahun. Proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2025 akan mencapai 611.204 jiwa dan 681.461 jiwa pada tahun 2030, dengan kepadatan penduduk meningkat menjadi 1.628 jiwa/km². Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung. Geopolitik dan Geoekonomi

Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan. Dimana pembangunan pertanian jauh tertinggal, tidak selaras, dibandingkan dengan

pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal belum optimal dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif. Kesenjangan pembangunan antar wilayah, Ketidakseimbangan struktur ekonomi antarsektor (ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata sangat dominan). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terbatas, tidak merata, kurang terpadu, dan kurang akselerasi.

Destinasi pariwisata di Daerah Bali belum menerapkan *Sustainable Tourism Development* sebagaimana Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

2. Lingkungan hidup

Pariwisata menjadi sektor utama perekonomian Kabupaten Badung selama beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan yang pesat pada sektor ini telah membawa beberapa dampak positif dan negatif terhadap wilayah, lingkungan dan masyarakat Badung. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan termasuk penurunan kualitas air dan tanah, kerusakan terumbu karang dan peningkatan polusi udara.

Penurunan kualitas air, terutama air sungai, polusi air dari limbah domestik, limbah industri dan penggunaan pupuk serta pestisida secara berlebihan telah mencemari sumber air, mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem air.

3. Infrastruktur pelayanan publik

Pesatnya perkembangan pariwisata yang diiringi dengan penambahan penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan pelayanan infrastruktur pelayanan publik yang memadai. Pertambahan jumlah kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya telah menimbulkan kemacetan di sebagian wilayah Kabupaten Badung, terutama di wilayah Badung Selatan dan Badung Tengah.

Penyediaan infrastruktur pelayanan publik seperti prasarana dan sarana transportasi, air minum dan persampahan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan. Terjadinya kemacetan parah pada sebagian besar wilayah Badung, belum optimalnya pelayanan air minum, serta belum adanya tata kelola persampahan yang baik dan berkelanjutan akan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Bali, diketahui bahwa kemacetan/keramaian fisik berpengaruh negatif terhadap daya tarik destinasi, keramaian manusia berpengaruh negatif terhadap daya tarik destinasi, daya tarik destinasi berpengaruh positif terhadap niat berkunjung ulang, keramaian fisik berpengaruh negatif terhadap niat berkunjung ulang, dan keramaian manusia bersifat negatif terhadap niat berkunjung ulang (Reggyananda & Roostika, 2023).

Badung yang memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) serta Infrastruktur persampahan yang belum berfungsi secara optimal harus menjadi perhatian yang serius bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam lima tahun kedepan. Permasalahan timbulan sampah pantai Pantai Kuta dan sekitarnya yang terjadi pada bulan Nopember sampai bulan Maret tahun berikutnya pada saat musim hujan dan musim angin barat, memerlukan solusi penanganan yang komprehensif, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Badung sendiri. Pemerintah Kabupaten Badung perlu mengambil langkah-langkah penanganan yang sistematis dan berkelanjutan, baik melalui penguatan regulasi, penanganan secara teknis maupun sosialisasi kepada masyarakat (Saputra et al., 2024).

Infrastruktur air minum yang belum memadai, terutama di wilayah Badung Selatan, menjadi permasalahan bagi Masyarakat di wilayah Badung Selatan. Kebutuhan air di daerah

Badung Selatan 2.000 liter per detik, namun baru bisa tersedia 900 liter per detik. Terhadap kondisi ini perlu dilakukan penambahan, pembaharuan dan perbaikan jaringan-jaringan yang ada di wilayah Badung Selatan tersebut.

4. Perkembangan teknologi

Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, terutama di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecanduan gadget dan gangguan tidur, kekhawatiran tentang privasi individu dan kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, seperti perusahaan atau pemerintah, peningkatan ancaman keamanan siber dan pengangguran teknologi. Automatisasi dan robotisasi dalam industri dapat menggantikan pekerja manusia hingga bisa menyebabkan pengangguran yang cukup besar. Hal ini memerlukan adaptasi masyarakat terhadap perubahan ekonomi dan pekerjaan. Masyarakat harus bisa meng-upgrade kemampuan agar bisa bersaing dengan perkembangan digital.

5. Perubahan iklim dan bencana

Kabupaten Badung mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Wilayah Badung yang terdiri dari pegunungan dan lautan, serta kepadatan penduduk dan kepadatan aktivitas perekonomian menjadikan Badung sebagai salah satu wilayah yang rawan bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran.

Perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia (Asnawi, 2015). Dampaknya meliputi kekeringan, banjir, tanah longsor, hingga kerusakan fasilitas bangunan dan infrastruktur. Untuk menghadapinya, diperlukan upaya adaptasi, peningkatan kompetensi, serta kerjasama antar pemangku kepentingan.

6. Ekonomi biru (*Blue economy*)

Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru meliputi beberapa sektor yaitu perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Ekonomi biru berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak seperti pembuat kebijakan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

7. Tenaga kerja hijau (*Green jobs*)

Green jobs merupakan jenis pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan. Menurut *International Labour Organization (ILO)*, *green jobs* menjadi lambang dari perekonomian dan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan mampu melestarikan lingkungan, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Jenis pekerjaan ini berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan, mencakup pekerjaan di bidang pertanian, industri, jasa, dan administrasi yang berkontribusi terhadap pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan juga memenuhi kriteria pekerjaan yang layak-upah yang memadai, kondisi yang aman, hak-hak pekerja, dialog sosial, serta perlindungan sosial. *Green jobs* juga mendorong kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Inisiatif ini dapat membentuk inklusivitas dan menciptakan kebiasaan baru bahwa setiap pekerjaan berpotensi menjadi lebih ramah lingkungan (Nainggolan et al., 2023).

Green jobs, bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon, mengurangi polusi, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, yang melibatkan bidang-bidang seperti energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen limbah, transportasi berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan.

8. Manajemen talenta

Pendukung utama suatu instansi adalah pegawai. Oleh karena itu, pegawai perlu dikelola secara profesional melalui pendekatan strategis yang memperhatikan bakat dan kompetensi. Saat ini metode pengelolaan pegawai yang berkembang di dunia adalah manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan salah satu konsep baru yang diperkenalkan

oleh *McKinsey* melalui suatu studi “*the war of talent*” pada tahun 1997. Manajemen talenta merupakan proses rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan penempatan pegawai secara profesional sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guna menjalankan strategi dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan instansi. Perencanaan kepegawaian melalui manajemen talenta dilakukan melalui pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan bakat secara konsisten. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang berpotensi dan layak untuk melanjutkan kepemimpinan berikutnya (regenerasi kepemimpinan) dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi (Bairizki, 2020).

9. Alih fungsi lahan pertanian

Alih fungsi lahan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah Bali pada umumnya dan juga di Kabupaten Badung pada khususnya. Isu alih fungsi lahan khususnya lahan sawah telah mencuat sejak beberapa dekade terakhir seiring dengan pesatnya pertumbuhan pariwisata. Alih fungsi lahan terutama terkait dengan peningkatan penyusutan lahan sawah dengan laju yang semakin meningkat. Pertanian sawah di Bali tidak hanya penting untuk menopang ketahanan pangan tetapi jauh daripada itu, pertanian sawah di Bali merupakan akar atau basis dari kebudayaan daerah dan kearifan lokal yang dilandasi oleh agama Hindu. Oleh karena itu, penyusutan lahan sawah secara sistematis sangat mengancam kelestarian budaya dan kearifan lokal Bali yang adiluhung.

Kesepuluh isu strategis tersebut kemudian diselaraskan dengan isu internasional, nasional dan Provinsi Bali. Penyelarasan dilakukan untuk memastikan bahwa isu-isu strategis daerah Kabupaten Badung telah selaras dengan isu strategis internasional, nasional dan daerah provinsi Bali. Penyelarasan isu strategis Kabupaten Badung dengan isu internasional, nasional dan provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 4,5 dan 6 berikut :

Tabel 4. Penyelarasan Isu Strategis Kabupaten Badung Dengan Isu Internasional

No.	Isu Internasional	Isu Strategis Kabupaten Badung
1.	menurunnya pertumbuhan ekonomi global	Geopolitik dan Geoekonomi Ekonomi biru Alih fungsi lahan pertanian
2.	penurunan inflasi yang lambat, meskipun pengetatan moneter agresif diterapkan di negara maju.	Geopolitik dan Geoekonomi Ekonomi biru Alih fungsi lahan pertanian
3.	tren suku bunga yang masih tinggi dalam jangka waktu yang lama atau <i>higer for longer</i> ,	Geopolitik dan Geoekonomi Ekonomi biru Alih fungsi lahan pertanian
4.	dolar AS masih kuat yang mengakibatkan pelemahan atau depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah	Geopolitik dan Geoekonomi Ekonomi biru Alih fungsi lahan pertanian
5.	<i>cash is the king</i> , dimana pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging ke negara maju sebagian besar ke Amerika. Disebabkan tingginya suku bunga dan kuatnya dolar	Geopolitik dan Geoekonomi Ekonomi biru Alih fungsi lahan pertanian
6.	posisi dan eksistensi Indonesia dalam diplomasi di forum-forum multilateral maupun organisasi-organisasi internasional	Geopolitik dan Geoekonomi
7.	kerja sama internasional untuk mewujudkan agenda SGDs	Geopolitik dan Geoekonomi Lingkungan hidup Alih fungsi lahan pertanian

8.	mitigasi Indonesia baik secara politik, militer, dan ekonomi jika terjadi perang besar di masa depan	Geopolitik dan Geoekonomi Perubahan iklim dan kebencanaan
----	--	--

[Sumber : Hasil analisis penulis, 2024]

Tabel 5. Penyelarasan Isu Strategis Kabupaten Badung Sengan Isu Strategis Nasional

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Kabupaten Badung
1.	Transformasi sosial	Perkembangan IPTEK Ledakan penduduk Tenaga kerja hijau
2.	Transformasi ekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi Ekonomi biru Tenaga kerja hijau Alih fungsi lahan pertanian Lingkungan hidup
3.	Transformasi tata kelola	Perkembangan Teknologi Manajemen talenta
4.	Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Geopolitik dan Geoekonomi
5.	Ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Lingkungan hidup Alih fungsi lahan pertanian

[Sumber: Hasil analisis penulis, 2024]

Tabel 6. Penyelarasan Isu Strategis Kabupaten Badung Dengan Isu Strategis Provinsi Bali

No.	Isu Strategis Provinsi Bali	Isu Strategis Kabupaten Badung
1.	Demografi global	Ledakan penduduk
2.	Geopolitik dan geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi
3.	Pertumbuhan kelas menengah	Ekonomi biru
4.	Persaingan sumber daya alam	Lingkungan hidup Alih fungsi lahan pertanian
5.	Perubahan iklim	Perubahan iklim dan kebencanaan
6.	Tata kelola keuangan global	Geopolitik dan Geoekonomi
7.	Perkembangan teknologi	Perkembangan Teknologi
8.	Infrastruktur	Infrastruktur pelayanan publik

[Sumber: Hasil analisis penulis, 2024]

Berdasarkan 4, 5 dan 6 dapat dilihat bahwa isu-isu strategis Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 telah selaras dengan isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Bali.

Setelah dilakukan penyelarasan dengan isu strategis internasional, nasional dan provinsi Bali, maka selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap isu strategis Kabupaten Badung. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi RPJMD.

Pembobotan isu strategis dilakukan melalui perankingan skor keterkaitan isu strategis Kabupaten Badung dengan isu strategis internasional, nasional dan provinsi Bali. Keterkaitan dengan isu strategis Provinsi deiberikan bobot 3, ketrkaitan dengan isu strategis nasional doberikan bobot 2, dan keterkaitan dengan isu strategis internasional diberikan bobot 1.

Selanjutnya berdasarkan hasil pembobotan tersebut akan diambil enam teratas untuk dijadikan isu strategis rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045. Berdasarkan tabel 4, 5 dan 6 dapat diketahui bobot keterkaitan masing-masing isu strategis sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pembobotan Isu strategis Kabupaten Badung Dengan Isu Strategis Internasional, Nasional Dan Provinsi Bali

No.	Isu Strategis Kabupaten Badung	Keterkaitan dengan Isu Strategis			Jumlah
		Internasiona l (skorxbobot)	Nasional (skorxbobot)	Provinsi (skorxbobot)	
1.	Ledakan penduduk	0	1x2	1x3	5
2.	Geopolitik dan Geoekonomi	8x1	2x2	1x3	15
3.	Lingkungan hidup	1x1	2x2	1x3	8
4.	Infrastruktur pelayanan publik	0	0	1x3	3
5.	Perkembangan Teknologi	0	2x2	1x3	7
6.	Perubahan iklim dan kebencanaan	1x1	0	1x3	4
7.	Ekonomi biru	5x1	1x2	1x3	10
8.	Tenaga kerja hijau	0	2x2	0	4
9.	Manajemen talenta	0	1x2	0	2
10.	Alih fungsi lahan pertanian	6x1	2x2	1x3	13

[Sumber: Hasil analisis penulis, 2024]

Sesuai dengan hasil pembobotan isu strategis sebagaimana tabel 7, maka isu strategis Kabupaten Badung yang akan dituangkan dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 berdasarkan bobotnya adalah:

1. Geopolitik dan Geoekonomi (Skor 15)
2. ALih fungsi lahan pertanian (Skor 13)
3. Ekonomi biru (*Blue economy*) (Skor 10)
4. Lingkungan hidup (Skor 8)
5. Perkembangan teknologi (Skor 7)
6. Ledakan penduduk (Skor 5)
7. Perubahan iklim dan kebencanaan (SKor 4)
8. Tenaga kerja hijau (*Green jobs*) (Skor 4)
9. Infrastruktur pelayanan publik (Skor 3)
10. Manajemen talenta (Skor 2)

Berdasarkan hasil pembobotan isu strategis pada tabel 7 diatas, maka terdapat rekomendasi kebijakan tentang isu strategis yang akan dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2045, yaitu :

1. Isu Geopolitik dan Geoekonomi.

Geopolitik dan Geoekonomi perlu dijadikan isu prioritas dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 guna mewujudkan keseimbangan sektor pertanian dengan pariwisata serta keseimbangan pembangunan Badung Utara yang

merupakan wilayah pertanian dengan Badung Selatan yang merupakan daerah pariwisata. Sektor pertanian harus menjadi penopang pembangunan kepariwisataan sehingga terjadi keseimbangan antara pertanian dan pariwisata.

2. Isu Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian sebagai dampak dari pesatnya perkembangan pariwisata sejak beberapa dekade terakhir menjadi salah satu isu yang cukup sulit dikendalikan oleh pemerintah. Dalam dokumen Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung dijelaskan bahwa luas sawah yang beralih fungsi di Kabupaten Badung relatif tinggi. Dalam periode 2013–2018 terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 645 ha. Alih fungsi lahan sawah dengan angka yang tinggi terjadi tahun 2014 seluas 157 ha dan tahun 2018 seluas 323 ha. Alih fungsi sawah terjadi semua kecamatan kecuali Kuta Selatan yang tidak terdapat sawah. Alih fungsi sawah tahun 2018 cukup luas di Kecamatan Kuta Utara dan Mengwi.

Untuk mencegah alih fungsi lahan yang semakin besar dalam lima tahun kedepan, maka isu alih fungsi lahan pertanian perlu dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Pengendalian alih fungsi lahan juga merupakan salah satu upaya pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu : 1) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 2) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 3) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.

3. Isu Ekonomi Biru (*Blue economy*).

Selain potensi pariwisata sebagai potensi unggulan yang berkontribusi besar terhadap PAD, Kabupaten Badung juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar dengan wilayah pesisir pantai yang membentang sepanjang 82 kilometer. Bidang perikanan menjadi salah satu mata pencaharian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.

Laut menyimpan potensi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Hanim & Noorman, 2017).

Untuk menjaga keberlanjutan atau kesinambungan sumber daya laut sebagai salah satu potensi perekonomian daerah, maka isu ekonomi biru perlu dijadikan sebagai salah satu isu strategis prioritas dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN Kabupaten Badung Tahun 2025-2029.

4. Isu Lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan termasuk penurunan kualitas air dan tanah, kerusakan terumbu karang dan peningkatan polusi udara merupakan salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius lima tahun kedepan. Kenaikian suhu udara, terjadinya perubahan iklim/cuaca, meningkatnya sampah plastik akan menjadi ancaman bagi generasi kita selanjutnya. Oleh karena itu, maka isu lingkungan hidup perlu dijadikan sebagai salah satu isu strategis prioritas dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN Kabupaten Badung Tahun 2025-2029.

5. Isu Perkembangan Teknologi.

Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, terutama di kalangan generasi muda, kekhawatiran tentang privasi individu dan kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, peningkatan ancaman keamanan siber, dan pengangguran teknologi, perlu mendapat perhatian dan pembahasan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029. Jika hal ini tidak mendapat perhatian serius pemerintah, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, keamanan data dan pengangguran terbuka.

6. Isu Ledakan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Badung yang begitu tinggi dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu sebesar 1.310 Jiwa/Km² (terpadat di kecamatan Kuta sebesar 3.377 Jiwa/Km²), jauh diatas kepadatan penduduk nasional tahun 2022 sebesar 145,7 Jiwa/Km². Jika kondisi ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka *carrying capacity* badung tidak mampu

lagi untuk mendukung pertumbuhan populasi penduduk dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan. Akan timbul permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi seperti pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, kelaparan dan permasalahan social lainnya. Oleh karena itu, isu ledakan penduduk menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk dibahas dalam perumusan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa analisis isu-isu strategis merupakan elemen krusial dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2025-2029. Identifikasi isu strategis yang tepat tidak hanya berkontribusi pada pengembangan visi dan misi kepala daerah, tetapi juga meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Dari hasil identifikasi terhadap isu-isu yang berkembang di tingkat global, nasional, dan daerah, terdapat sepuluh isu strategis yang telah diselaraskan dengan isu-isu global, nasional, dan Provinsi Bali. Isu-isu tersebut meliputi ledakan penduduk, geopolitik dan geoekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur pelayanan publik, perkembangan teknologi, perubahan iklim dan kebencanaan, ekonomi biru, tenaga kerja hijau, manajemen talenta, dan alih fungsi lahan pertanian.

Setelah dilakukan pembobotan berdasarkan keterkaitan isu strategis Kabupaten Badung dengan isu internasional, nasional, dan Provinsi Bali, dirumuskan enam isu strategis utama untuk RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2025-2029, yaitu: geopolitik dan geoekonomi, alih fungsi lahan pertanian, ekonomi biru, lingkungan hidup, perkembangan teknologi, dan ledakan penduduk. Keseluruhan isu ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi daerah, serta penekanan pada keberlanjutan dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 44–64.
- Altas, A. (2023). Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 196–207.
- Andrias, M. Y. (2024). Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten/Kota) Perspektif Peraturan Perundang. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 68–77.
- Asnawi, R. (2015). Perubahan iklim dan kedaulatan pangan di Indonesia. Tinjauan produksi dan kemiskinan. *Sosio Informa*, 1(3).
- Bairizki, A. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)-Jilid 1* (Vol. 1). Pustaka Aksara.
- Bidarti, A. (2020). *Teori kependudukan*. Penerbit Lindan Bestari.
- Bondar, A. (2019). Analisis pembangunan bidang perpustakaan terhadap peningkatan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan. *Media Pustakawan*, 26(2), 72–80.
- Fadli, M. R. (2021). *Studi Perilaku Dinamis Struktur Jembatan Gantung Pejalan Kaki Akibat Beban Manusia Bergerak (Studi Kasus: Jembatan Pejalan Kaki Bendung Prafi)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hanim, L., & Noorman, M. S. N. (2017). Kebijakan kelautan dalam rangka menjaga dan

- mengelola sumber daya alam laut sebagai upaya mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 1–12.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Maramis, A. P. P. M., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Governance*, 1(1).
- Nainggolan, H., Nuraini, R., Sepriano, S., Aryasa, I. W. T., Meilin, A., Adhicandra, I., Putri, E., Andiyan, A., & Prayitno, H. (2023). *Green Technology Innovation: Transformasi Teknologi Ramah Lingkungan berbagai Sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Reggyananda, E., & Roostika, R. (2023). Dampak Kemacetan di Lokasi Wisata dan Pengaruhnya terhadap Persepsi Wisatawan di Pulau Bali. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 2(2), 31–46.
- Saputra, I. G. S. D. B., Setiawan, I. M. O. A., Sudiarmika, I. P. G. A., Pramarta, N. B., & Artana, W. W. (2024). Sistem Informasi Manajemen Komunitas Berbasis Web (Studi Kasus: Itb Stikom Bali Kampus Jimbaran). *Jurnal Sutasoma*, 2(2), 123–132.
- Senuk, A., Hadi, A., Amin, C., & Yetty, Y. (2021). Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*, 1(1).
- Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. *Strategi Perang Semesta*, 6(1).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.